



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

7 April 2026

APBN YANG SEHAT, KREDIBEL, DAN EFEKTIF

Abstrak

Makalah ini membahas tiga kualitas normatif dan praktis yang harus dimiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sehat, kredibel, dan efektif. Argumen utama makalah ini adalah bahwa APBN yang baik bukan sekadar APBN yang besar atau ekspansif, melainkan APBN yang mampu menjaga kesinambungan fiskal, memperoleh kepercayaan publik dan pasar, serta menghasilkan dampak pembangunan yang nyata. Dalam konteks Indonesia, kualitas “sehat” tercermin pada kemampuan menjaga defisit dan utang dalam batas aman, memperkuat ruang fiskal, dan mempertahankan fungsi APBN sebagai stabilisator ekonomi. Kualitas “kredibel” tercermin pada konsistensi antara aturan, asumsi, penganggaran, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban, termasuk transparansi fiskal dan akuntabilitas audit. Kualitas “efektif” tercermin pada sejauh mana setiap rupiah belanja menghasilkan layanan publik, perlindungan sosial, produktivitas, dan transformasi ekonomi yang terukur. Secara empiris, APBN 2025 menetapkan belanja negara Rp3.621,3 triliun dengan target defisit 2,53 persen PDB, sedangkan APBN 2026 menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Sementara itu, realisasi sementara APBN 2025 menutup tahun dengan defisit 2,92 persen PDB, dan hingga akhir Februari 2026 realisasi pendapatan negara mencapai Rp358,0 triliun, belanja negara Rp493,8 triliun, serta defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB. IMF menilai

Indonesia tetap memiliki kredibilitas kebijakan yang kuat, tetapi menekankan pentingnya pelaksanaan belanja yang hati-hati, mobilisasi penerimaan, serta pembatasan aktivitas quasi-fiscal agar ruang kebijakan tetap terjaga. Bank Dunia dan OECD sama-sama menekankan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya pada jumlah belanja, tetapi terutama pada kualitas belanja, efisiensi alokasi, dan penguatan penerimaan domestik. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini menyimpulkan bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan efektif menuntut keseimbangan antara disiplin fiskal, kualitas tata kelola, dan orientasi hasil. APBN yang sehat tanpa efektivitas akan menjadi fiskal yang rapi tetapi lemah dampak. APBN yang efektif tanpa kesehatan fiskal akan menjadi aktivisme anggaran yang rapuh. Sementara APBN yang sehat dan efektif tanpa kredibilitas akan kehilangan legitimasi dan daya dorong. Karena itu, ketiganya harus dibangun sebagai satu kesatuan. ([Kemenkeu Media](#))

Kata kunci: *APBN, kesehatan fiskal, kredibilitas fiskal, efektivitas belanja, kualitas belanja, ruang fiskal, Indonesia*

APBN yang Sehat, Kredibel, dan Efektif

Pendahuluan

Dalam negara modern, APBN bukan hanya dokumen akuntansi negara, melainkan teks politik, kontrak sosial, dan instrumen manajemen pembangunan. Melalui APBN, negara menunjukkan prioritasnya: sektor mana yang dibiayai, kelompok mana yang dilindungi, risiko mana yang diantisipasi, dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun. Karena itu, perdebatan mengenai APBN pada dasarnya bukan sekadar perdebatan teknis mengenai angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan juga perdebatan tentang kualitas negara itu sendiri. APBN yang kuat harus sanggup melakukan tiga fungsi sekaligus: menjaga stabilitas,

mendistribusikan keadilan, dan menggerakkan transformasi. Di Indonesia, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena APBN tidak hanya bekerja dalam situasi normal, tetapi juga berperan sebagai shock absorber ketika ekonomi menghadapi perlambatan, tekanan geopolitik, volatilitas komoditas, atau tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan sendiri menegaskan bahwa APBN perlu tetap ekspansif secara terarah, tetapi sekaligus sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

(fiskal.kemenkeu.go.id)

Secara hukum dan kelembagaan, APBN Indonesia dibangun di atas reformasi keuangan negara pasca-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Reformasi tersebut membawa perubahan mendasar: penganggaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki jangkar fiskal yang penting, yaitu pembatasan defisit kumulatif APBN dan APBD tidak melebihi 3 persen PDB serta rasio pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah tidak melebihi 60 persen PDB. Jangkar ini bukan semata simbol kehati-hatian, melainkan fondasi kredibilitas fiskal nasional. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, batas itu memberi sinyal bahwa Indonesia tidak membiarkan kebijakan anggaran bergerak tanpa pagar kelembagaan.

([DJPB Kemenkeu](http://DJPB.Kemenkeu))

Namun demikian, keberadaan aturan formal tidak otomatis menjamin kualitas APBN. Sebuah APBN dapat terlihat sehat di atas kertas, tetapi tidak efektif dalam mendorong hasil pembangunan. Sebaliknya, APBN dapat tampak sangat pro-rakyat karena banyak belanja dan banyak program, tetapi sesungguhnya rapuh secara fiskal dan lemah dalam akuntabilitas. Karena itu, makalah ini berangkat dari satu pertanyaan utama: apa yang dimaksud dengan APBN yang sehat, kredibel, dan efektif, dan bagaimana kualitas itu dibaca dalam konteks Indonesia 2025–2026? Pertanyaan ini relevan karena APBN 2025 dan 2026 berdiri pada persimpangan penting: di satu sisi Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen dan inflasi Desember 2025 sebesar 2,92 persen; di sisi lain negara menghadapi kebutuhan belanja yang semakin besar untuk prioritas

pembangunan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta program-program baru yang menuntut pembiayaan berkelanjutan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berargumen bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan efektif tidak boleh dipahami sebagai tiga kualitas yang berdiri sendiri. Ketiganya saling mengunci. Kesehatan fiskal menyediakan ruang gerak. Kredibilitas menyediakan kepercayaan. Efektivitas menyediakan legitimasi substantif. Tanpa kesehatan fiskal, APBN kehilangan daya tahan. Tanpa kredibilitas, APBN kehilangan kepercayaan publik dan pasar. Tanpa efektivitas, APBN kehilangan makna pembangunan. Dengan menggunakan sumber resmi pemerintah Indonesia, IMF, Bank Dunia, OECD, dan BPK, makalah ini menyusun pembahasan konseptual dan empiris untuk menunjukkan bagaimana ketiga kualitas itu seharusnya dibangun sekaligus. ([IMF](#))

Hakikat APBN: dari Postur Fiskal ke Instrumen Negara

Pada tataran paling dasar, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR. Namun definisi formal itu terlalu sempit bila dipakai untuk membaca fungsi APBN dalam praktik bernegara. Direktorat Jenderal Anggaran menjelaskan bahwa postur APBN pada hakikatnya menggambarkan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, dan akuntabilitas pemerintah. Artinya, APBN bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran, tetapi cermin dari cara pemerintah membaca risiko, mengelola sumber daya, dan mengarahkan pembangunan. Dalam bahasa yang lebih substantif, APBN adalah jembatan antara strategi nasional dan pelayanan publik sehari-hari. ([Anggaran](#))

Sebuah narasi sederhana dapat menjelaskan hal ini. Bayangkan APBN sebagai sistem peredaran darah negara. Pendapatan negara adalah sumber energinya, belanja adalah aliran yang menghidupi organ-organ publik, dan pembiayaan adalah mekanisme penyangga ketika aliran alami belum cukup. Jika aliran itu terlalu kecil, tubuh negara melemah. Jika aliran itu terlalu boros dan tak terkendali, tubuh negara bisa kehilangan keseimbangan. Jika aliran itu banyak tersumbat pada pos-pos yang kurang

produktif, maka organ yang paling membutuhkan justru tidak memperoleh pasokan yang memadai. Karena itu, menilai APBN tidak cukup dari besar kecilnya, tetapi dari kesehatan sistem alirannya: apakah pendapatan cukup kuat, apakah belanja dialokasikan dengan baik, dan apakah pembiayaan dikelola secara prudent. Kerangka inilah yang dipakai IMF ketika menekankan pentingnya menjaga policy space, revenue mobilization, dan membatasi aktivitas quasi-fiscal agar jejak fiskal keseluruhan tetap jelas.

([IMF](#))

Dalam praktik Indonesia, APBN juga memikul beban sejarah dan politik yang besar. Ia diharapkan membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, subsidi, transfer ke daerah, pelayanan utang, ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program prioritas baru. Karena tuntutan itu sangat banyak, APBN selalu berada dalam ketegangan antara fungsi stabilisasi jangka pendek dan fungsi transformasi jangka panjang. Kementerian Keuangan berulang kali menegaskan bahwa APBN harus tetap sehat dan kredibel, tetapi juga harus berpihak pada rakyat dan mendorong pertumbuhan. Di sinilah pentingnya membedakan antara APBN yang sekadar aktif membelanjakan uang dan APBN yang benar-benar bekerja menghasilkan nilai publik. ([Media Keuangan](#))

Makna APBN yang Sehat

APBN yang sehat pertama-tama berarti APBN yang berkelanjutan. Ia tidak membiayai belanja hari ini dengan cara yang merusak kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan esok hari. Dalam praktik fiskal Indonesia, kesehatan ini ditopang oleh jangkar defisit maksimal 3 persen PDB dan rasio utang maksimal 60 persen PDB. Pada level operasional, APBN 2025 ditetapkan dengan target defisit 2,53 persen PDB atau Rp616,2 triliun, sementara APBN 2026 mematok pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjaga defisit di bawah ambang legal dan mencoba mempertahankan disiplin fiskal meskipun kebutuhan belanja meningkat. ([DJPB Kemenkeu](#))

Tetapi kesehatan APBN tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan terhadap ambang angka. Fiskal yang sehat juga berarti memiliki struktur pendapatan yang memadai. Bank Dunia menegaskan bahwa kapasitas penghimpunan penerimaan Indonesia masih rendah, sehingga membatasi amplop belanja, termasuk untuk sektor prioritas dan pembangunan modal manusia. Dalam PER Indonesia, Bank Dunia menyoroti bahwa rendahnya rasio penerimaan terhadap PDB membuat Indonesia harus sangat hati-hati dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. OECD juga menyatakan bahwa karena peningkatan penerimaan membutuhkan waktu, pemerintah harus memastikan bahwa belanja yang ada benar-benar memberikan hasil terbaik. Jadi, APBN sehat bukan hanya soal menahan defisit, tetapi juga soal memperbesar basis fiskal secara berkelanjutan. ([World Bank](#))

Makna berikutnya adalah APBN yang sehat harus sanggup menjadi countercyclical tanpa kehilangan kendali. Kinerja sementara APBN 2025 menunjukkan defisit akhir tahun tetap dapat dikendalikan pada 2,92 persen PDB atau Rp695,1 triliun, sementara pemerintah menegaskan bahwa dorongan fiskal tetap diberikan untuk menopang pertumbuhan di tengah perlambatan global. Ini memperlihatkan satu prinsip penting: kesehatan fiskal tidak identik dengan austeritas. Fiskal yang sehat justru adalah fiskal yang bisa berekspansi ketika diperlukan, tetapi tetap dalam batas aman. Dalam pengertian ini, kesehatan APBN diukur bukan hanya dari ketatnya pengekan belanja, melainkan dari keluwesannya merespons siklus ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan. ([fiskal.kemenkeu.go.id](#))

Kesehatan juga terkait erat dengan kualitas pembiayaan. Nota Keuangan RAPBN 2026 menegaskan bahwa pembiayaan anggaran diarahkan secara prudent, inovatif, dan sustainable, sekaligus memanfaatkan SAL, SMV, BLU, dan penguatan fiskal buffer. Pada saat yang sama, komposisi utang pemerintah masih didominasi Surat Berharga Negara, yang menurut DJPPR mencapai sekitar 87,02 persen dari total utang, sedangkan rasio utang terhadap PDB berada pada 40,46 persen. Angka ini masih jauh di bawah batas 60 persen, tetapi tetap mengandung pesan penting: kesehatan fiskal

bukan berarti anti-utang, melainkan utang yang terukur, terjangkau, dan dikelola dengan strategi risiko yang baik. ([Kemenkeu Media](#))

Di titik ini perlu ditegaskan bahwa APBN sehat bukan tujuan akhir, melainkan kondisi yang memungkinkan negara bertindak. Tanpa kesehatan fiskal, APBN menjadi seperti rumah tangga yang terus berutang untuk biaya rutin tanpa memperkuat pendapatan. Ia mungkin masih tampak sanggup berjalan, tetapi sebenarnya kian kehilangan ruang keputusan. Sebaliknya, APBN yang sehat memberi negara kemampuan untuk menyerap guncangan, menjaga belanja prioritas, dan membiayai transformasi jangka panjang. Karena itu, menjaga kesehatan APBN berarti menjaga kapasitas negara itu sendiri. ([IMF](#))

Makna APBN yang Kredibel

Jika kesehatan berbicara tentang daya tahan, maka kredibilitas berbicara tentang kepercayaan. APBN yang kredibel adalah APBN yang dipercaya karena dirancang berdasarkan asumsi yang realistis, dilaksanakan dengan konsisten, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. IMF dalam Article IV 2025 menilai bahwa menjaga kredibilitas kebijakan yang telah dibangun Indonesia adalah hal yang krusial di tengah ketidakpastian global. IMF menyambut komitmen Indonesia pada kebijakan fiskal yang prudent dan aturan fiskal yang kredibel, tetapi sekaligus menekankan bahwa pelaksanaan belanja harus hati-hati, mobilisasi penerimaan ditingkatkan, dan aktivitas below-the-line serta quasi-fiscal dibatasi agar keseluruhan jejak fiskal jelas. Dengan kata lain, kredibilitas tidak berhenti pada aturan formal, tetapi menyangkut integritas keseluruhan desain dan praktik fiskal. ([IMF](#))

Dalam konteks Indonesia, kredibilitas APBN terbangun melalui beberapa lapis. Lapis pertama adalah kepastian hukum dan kelembagaan. APBN 2026 telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2025, sementara APBN 2025 juga disahkan dengan penegasan bahwa posturnya dijaga tetap sehat dan kredibel. Kepastian seperti ini penting karena memberi dasar hukum, horizon kebijakan, dan sinyal kepada pelaku ekonomi bahwa kebijakan

fiskal tidak bergerak secara improvisasional. Pasar keuangan, investor, dan masyarakat tidak hanya melihat besar anggaran, tetapi juga apakah proses penyusunannya tertib, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan.

([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Lapis kedua adalah konsistensi antara rencana dan realisasi. APBN 2025 menetapkan belanja negara Rp3.621,3 triliun, sementara realisasi sementara 2025 tetap menghasilkan defisit yang terjaga pada 2,92 persen PDB. Pada awal 2026, realisasi hingga akhir Februari menunjukkan pendapatan negara Rp358,0 triliun, belanja negara Rp493,8 triliun, dan defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya mengumumkan postur APBN, tetapi juga menjalankan pembiayaan dan eksekusi anggaran secara bertahap dan terukur. Newsletter APBN KiTa Februari 2026 juga menekankan bahwa pembiayaan dijalankan on track, dengan active cash and debt management untuk menjaga likuiditas dan kepercayaan pasar. Kredibilitas lahir ketika pasar melihat bahwa pemerintah bukan hanya punya rencana, tetapi juga mampu mengeksekusinya tanpa kepanikan.

([Kemenkeu Media](#))

Lapis ketiga adalah akuntabilitas pelaporan dan audit. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2024, yang merupakan capaian penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun, data resmi juga menunjukkan bahwa dua LKKL memperoleh opini WDP meskipun tidak material terhadap LKPP secara keseluruhan, dan laporan pemeriksaan tetap mencatat 14 temuan dengan 31 rekomendasi tindak lanjut. Ini sangat penting bagi konsep kredibilitas. Kredibilitas fiskal bukan berarti tanpa kekurangan, melainkan keberanian mengakui kekurangan, memperbaikinya, dan menindaklanjuti temuan secara serius. WTP penting, tetapi WTP tanpa perbaikan tata kelola hanya menghasilkan kepuasan administratif, bukan kredibilitas substantif. ([DJPB Kemenkeu](#))

Lapis keempat adalah kehati-hatian terhadap aktivitas quasi-fiskal. IMF secara khusus mengingatkan agar Indonesia membatasi aktivitas di luar

neraca fiskal yang dapat memperbesar contingent liabilities, termasuk yang terkait badan investasi dan instrumen pembiayaan nonkonvensional. Peringatan ini relevan karena semakin kompleks kebijakan pembangunan, semakin besar godaan untuk memindahkan sebagian beban fiskal ke lembaga-lembaga di luar APBN yang formal. Langkah seperti itu mungkin tampak memudahkan dalam jangka pendek, tetapi jika tidak diawasi dengan tata kelola yang kuat justru melemahkan kredibilitas APBN. Sebab publik dan pasar akhirnya menilai fiskal bukan dari angka resmi semata, melainkan dari seluruh komitmen implisit negara. ([IMF](#))

Secara naratif, APBN kredibel dapat dianalogikan sebagai janji negara yang dapat dipercaya. Sebuah janji tidak dipercaya hanya karena tertulis rapi. Ia dipercaya karena dibuat secara masuk akal, disampaikan secara terbuka, dilaksanakan secara konsisten, dan diaudit dengan jujur. Maka APBN yang kredibel adalah APBN yang “ucapan fiskalnya” sama dengan “tindak fiskalnya”. Itulah sebabnya kredibilitas merupakan aset yang mahal: sekali hilang, biaya pembiayaan naik, keraguan pasar membesar, dan setiap kebijakan baru dibaca dengan skeptis. ([IMF](#))

Makna APBN yang Efektif

Jika kesehatan adalah ruang gerak dan kredibilitas adalah kepercayaan, maka efektivitas adalah hasil. APBN yang efektif adalah APBN yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya serapan anggaran atau tumpukan program. Pemerintah sendiri menegaskan dalam arsitektur APBN 2026 bahwa kualitas belanja harus terus ditingkatkan dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata. Media Keuangan Kemenkeu juga menyatakan bahwa belanja negara harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, efektivitas APBN pada intinya adalah kemampuan mengubah belanja menjadi outcomes. ([Media Keuangan](#))

Secara kelembagaan, Indonesia telah memiliki fondasi untuk itu. Reformasi penyusunan anggaran pasca-UU Keuangan Negara menekankan medium-

term expenditure framework, unified budget, dan performance budgeting. Di atas fondasi ini, penganggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk menghubungkan program dengan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi. OECD menegaskan bahwa performance information, budget impact assessments, dan evaluasi kebijakan publik adalah alat penting untuk meningkatkan kualitas keputusan belanja. Dengan kata lain, efektivitas APBN tidak boleh dinilai dari berapa cepat anggaran habis, tetapi dari apa yang berubah sesudah anggaran dibelanjakan. ([DJPB Kemenkeu](#))

Tantangan Indonesia adalah bahwa efektivitas sering kalah oleh dua ukuran yang lebih mudah: besaran alokasi dan tingkat penyerapan. Padahal Bank Dunia menekankan bahwa masalah inti Indonesia bukan sekadar kecilnya pengeluaran, tetapi juga kualitas pengeluaran. OECD menambahkan bahwa negara dengan sumber daya fiskal terbatas harus memastikan bahwa alokasi belanja benar-benar efisien, terkoordinasi, dan dihubungkan dengan tujuan jangka menengah. Ini berarti APBN efektif menuntut disiplin dalam memilih prioritas. Tidak semua yang penting bisa dibiayai sekaligus, dan tidak semua yang populer otomatis efektif. ([World Bank](#))

Efektivitas juga sangat terkait dengan ketepatan sasaran. APBN 2025 secara eksplisit menyebut reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Ini adalah pengakuan penting bahwa belanja besar tidak menjamin dampak besar. Dalam banyak kasus, kebocoran manfaat, salah sasaran, duplikasi program, atau lemahnya integrasi data justru membuat belanja tinggi menjadi kurang produktif. Karena itu, efektivitas APBN harus dibaca sampai ke tingkat desain penyaluran, data penerima, dan pemantauan hasil. Sebuah subsidi energi yang luas mungkin terlihat politis efektif, tetapi belum tentu fiskal efektif. Sebuah bantuan sosial yang besar mungkin terlihat populis, tetapi baru sungguh efektif jika menurunkan kerentanan dan membantu rumah tangga membangun kapasitas hidup yang lebih baik. ([Kemenkeu Media](#))

Lebih jauh, efektivitas APBN juga mensyaratkan hubungan yang kuat antara pusat dan daerah. APBN 2025 menempatkan transfer ke daerah Rp919,9 triliun, dan Presiden dalam arsitektur APBN 2026 menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah harus dipandang sebagai satu kesatuan, bukan dua dunia terpisah. Pernyataan ini penting karena banyak outcome publik—pendidikan, kesehatan dasar, infrastruktur lokal, pengendalian inflasi pangan—tidak selesai di meja kementerian pusat. Ia ditentukan oleh kualitas eksekusi daerah. Maka APBN efektif bukan hanya soal kementerian pusat belanja dengan benar, tetapi juga apakah keseluruhan sistem keuangan negara bekerja harmonis hingga level layanan publik. ([Kemenkeu Media](#))

Membaca APBN Indonesia 2025–2026

Bila konsep sehat, kredibel, dan efektif dibawa ke konteks Indonesia 2025–2026, maka tampak satu gambaran yang relatif positif, tetapi tetap menuntut kewaspadaan. Dari sisi makro, Indonesia menutup tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dan inflasi Desember 2025 sebesar 2,92 persen. Realisasi sementara APBN 2025 menunjukkan defisit tetap terkendali pada 2,92 persen PDB. Ini memberi sinyal bahwa APBN masih mampu menjalankan fungsi stabilisasi tanpa keluar dari pagar fiskal. Dengan kata lain, dari sudut kesehatan makro-fiskal, Indonesia belum berada dalam zona alarm. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi postur, APBN 2025 mengalokasikan belanja negara Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Kebijakan belanja 2025 diarahkan pada penguatan kualitas belanja, efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja modal, reformasi subsidi dan perlinsos yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan efektivitas implementasi hubungan keuangan pusat-daerah. Ini menunjukkan bahwa secara desain, pemerintah sadar bahwa kualitas belanja harus menjadi agenda utama. Masalahnya bukan pada absennya kesadaran, melainkan pada konsistensi implementasi. ([Kemenkeu Media](#))

APBN 2026 melanjutkan logika tersebut, tetapi dalam skala yang lebih besar dan ambisi yang lebih tinggi. Postur resminya menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Dalam fase perancangannya, Nota Keuangan RAPBN 2026 sempat mematok belanja Rp3.786,5 triliun, pendapatan Rp3.147,7 triliun, dan defisit 2,48 persen PDB. Perbedaan antara tahap perancangan dan tahap penetapan ini justru memperlihatkan bahwa APBN adalah produk negosiasi politik-fiskal yang hidup, bukan rumus mekanis. Namun perubahan itu juga mengingatkan bahwa kredibilitas APBN sangat bergantung pada kemampuan menjelaskan mengapa penyesuaian terjadi, bagaimana pembiayaannya ditanggung, dan apa dampaknya terhadap kesinambungan fiskal. ([Kemenkeu Media](#))

Pada awal pelaksanaannya, APBN 2026 memperlihatkan tanda yang relatif baik. Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp358,0 triliun atau 11,4 persen target, tumbuh 12,8 persen secara tahunan, sementara belanja negara Rp493,8 triliun atau 12,8 persen pagu, dengan defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB. Penerimaan pajak neto sampai Februari 2026 juga tumbuh 30,4 persen. Ini penting untuk dibaca sebagai indikator kredibilitas jangka pendek: APBN tidak hanya besar di dokumen, tetapi juga menunjukkan performa awal yang cukup kuat di sisi penerimaan dan eksekusi. Tentu dua bulan pertama bukan penentu final, tetapi ia memberi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga ritme fiskal tanpa kehilangan momentum belanja. ([Indonesian Ministry of Finance](#))

Namun di balik kekuatan itu ada tiga tantangan besar. Pertama, kapasitas penerimaan negara masih perlu diperkuat agar APBN tidak terlalu dibatasi oleh amplop fiskal yang sempit. Kedua, kualitas belanja harus terus diperbaiki agar setiap perluasan prioritas tidak otomatis berarti perluasan inefisiensi. Ketiga, perlu kewaspadaan terhadap jejak fiskal yang meluas lewat pembiayaan inovatif, penugasan lembaga lain, atau aktivitas quasi-fiskal. Ketiga tantangan ini persis yang ditekankan oleh IMF, Bank Dunia, dan OECD: ruang fiskal Indonesia perlu dijaga bukan hanya dengan

menahan defisit, tetapi dengan memperkuat penerimaan, memperbaiki kualitas belanja, dan memperjelas keseluruhan footprint fiskal. ([IMF](#))

Tiga Ilustrasi Naratif

Ilustrasi pertama adalah APBN sebagai shock absorber. Ketika ekonomi dunia melambat, harga komoditas bergejolak, dan daya beli masyarakat tertekan, negara tidak bisa hanya mengandalkan pasar. Ia perlu hadir melalui belanja sosial, subsidi yang terukur, insentif yang tepat, dan percepatan belanja prioritas. Kinerja APBN 2025 yang tetap menjaga pertumbuhan sambil menutup defisit di bawah 3 persen menunjukkan bahwa shock absorber yang sehat bukanlah APBN yang pasif, melainkan APBN yang bertindak tanpa kehilangan disiplin. Di sini kesehatan dan efektivitas bertemu: APBN harus cukup kuat menopang ekonomi, tetapi cukup disiplin agar tidak menjadi sumber krisis baru.

(fiskal.kemenkeu.go.id)

Ilustrasi kedua adalah reformasi subsidi dan perlindungan sosial. Pemerintah telah menegaskan reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran, dan Presiden pada arsitektur APBN 2026 juga menekankan bahwa subsidi energi dan bansos harus berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Mengapa ini penting? Karena APBN efektif tidak diukur dari berapa besar subsidi dibagikan, tetapi dari berapa tepat manfaatnya sampai kepada yang membutuhkan. Ketika subsidi salah sasaran, APBN mungkin terlihat murah hati, tetapi sebenarnya kurang efektif dan kurang adil. Dalam situasi seperti ini, kesehatan fiskal, kredibilitas tata kelola, dan efektivitas distribusi bersinggungan secara langsung. ([Kemenkeu Media](#))

Ilustrasi ketiga adalah program prioritas baru. APBN 2026 memuat delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi hingga pendidikan, kesehatan, desa, UMKM, dan percepatan investasi. Secara politik dan pembangunan, agenda-agenda ini penting. Tetapi setiap agenda baru membawa pertanyaan fiskal yang serius: apakah pembiayaannya berkelanjutan, apakah pelaksanaannya siap, dan apakah indikator hasilnya jelas. Di sinilah efektivitas diuji. APBN yang sehat dan

kredibel harus berani membiayai prioritas, tetapi juga berani mengevaluasi apakah prioritas itu sungguh-sungguh menghasilkan nilai tambah sosial-ekonomi yang proporsional terhadap biayanya. ([Media Keuangan](#))

Agenda untuk Membangun APBN yang Sehat, Kredibel, dan Efektif

Agenda pertama adalah memperkuat mobilisasi penerimaan. Tanpa basis pendapatan yang lebih kuat, semua diskusi tentang prioritas pada akhirnya menjadi permainan alokasi dalam ruang yang sempit. Bank Dunia menilai rendahnya kapasitas penerimaan Indonesia membatasi belanja untuk sektor-sektor prioritas, sementara IMF juga menekankan pentingnya enhanced revenue mobilization untuk menjaga buffer fiskal dan mencapai tujuan sosial-pembangunan. Ini berarti reformasi perpajakan dan PNBP bukan isu teknokratis semata, tetapi inti dari kesehatan fiskal jangka menengah. ([World Bank](#))

Agenda kedua adalah menjadikan kualitas belanja sebagai disiplin, bukan slogan. Pemerintah telah berbicara tentang penguatan kualitas belanja, spending better, dan setiap rupiah harus memberi manfaat nyata. Tetapi untuk mewujudkannya, diperlukan evaluasi program yang lebih ketat, penggunaan indikator outcome yang lebih tegas, dan penghentian atau redesign program yang tidak efektif. OECD menekankan bahwa informasi kinerja, penilaian dampak anggaran, dan evaluasi kebijakan harus terintegrasi ke dalam proses anggaran. Dengan kata lain, efektivitas APBN harus dibangun sebelum uang dibelanjakan, bukan baru disadari setelah anggaran habis. ([Kemenkeu Media](#))

Agenda ketiga adalah memperkuat belanja yang berorientasi hasil dan nilai publik. Renstra DJPb 2026 menyebut value-driven spending sebagai arah strategis. Konsep ini penting karena menggeser orientasi dari sekadar kepatuhan administrasi menuju dampak kepada masyarakat. Dalam pendekatan ini, belanja pendidikan dinilai dari kualitas pembelajaran, belanja kesehatan dari kualitas layanan dan pencegahan, belanja perlindungan sosial dari penurunan kerentanan, dan belanja infrastruktur

dari konektivitas serta produktivitas yang dihasilkan. Anggaran yang berorientasi nilai publik adalah inti APBN efektif. ([DJPB Kemenkeu](#))

Agenda keempat adalah memperkuat transparansi atas pembiayaan dan risiko fiskal. Pembiayaan yang kreatif dan inovatif memang penting, tetapi harus selalu disertai guardrails yang kuat. Peringatan IMF tentang contingent liabilities dan quasi-fiscal activities menunjukkan bahwa kredibilitas fiskal modern tidak cukup dibangun lewat laporan defisit resmi. Publik dan pasar juga ingin tahu apa yang tersembunyi di balik pembiayaan inovatif, penugasan lembaga, jaminan, dan proyek-proyek yang dibiayai di luar APBN langsung. Karena itu, APBN yang kredibel memerlukan peta risiko fiskal yang lebih jujur dan komprehensif. ([IMF](#))

Agenda kelima adalah menempatkan audit sebagai alat pembelajaran institusional. Opini WTP atas LKPP 2024 merupakan pencapaian penting, tetapi tindak lanjut atas temuan audit jauh lebih menentukan kualitas APBN ke depan. Jika temuan-temuan BPK hanya dibaca sebagai gangguan administratif, maka audit kehilangan fungsi strategisnya. Sebaliknya, bila temuan dilihat sebagai bahan perbaikan desain program, sistem pengendalian, dan kualitas data, maka audit menjadi komponen penting APBN yang kredibel dan efektif. ([DJPB Kemenkeu](#))

Agenda keenam adalah membangun integrasi pusat-daerah yang lebih nyata. Transfer ke daerah harus semakin dikaitkan dengan kualitas belanja produktif, pelayanan publik, dan outcome yang dapat diukur. Kemenkeu sendiri dalam penjelasan APBN 2025 menekankan pentingnya peningkatan efektivitas hubungan keuangan pusat-daerah, sementara pernyataan Presiden pada APBN 2026 juga menekankan perlunya memandang belanja pusat dan transfer daerah sebagai satu kesatuan. APBN efektif tidak mungkin terwujud jika belanja pusat bergerak ke satu arah dan daerah ke arah lain. ([Kemenkeu Media](#))

Penutup

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan efektif adalah konstruksi yang bersifat simultan. Ia tidak bisa dibangun sepotong-sepotong. Kesehatan fiskal memastikan bahwa negara tidak kehabisan napas. Kredibilitas memastikan bahwa negara dipercaya dalam janji dan tindakannya. Efektivitas memastikan bahwa rakyat benar-benar menerima hasil dari anggaran yang dibelanjakan. Dalam konteks Indonesia, ketiga unsur ini semakin penting karena APBN memikul peran ganda: sebagai pelindung masyarakat dalam jangka pendek dan sebagai penggerak transformasi nasional dalam jangka panjang. ([IMF](#))

Indonesia saat ini memiliki fondasi yang cukup baik. Defisit masih dijaga di bawah aturan, rasio utang masih berada dalam batas aman, audit LKPP tetap memperoleh opini WTP, dan pemerintah terus menegaskan pentingnya kualitas belanja. APBN 2025 dan 2026 juga menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi yang terarah dan disiplin fiskal. Namun fondasi yang baik bukan alasan untuk berpuas diri. Rendahnya kapasitas penerimaan, tantangan kualitas belanja, risiko aktivitas quasi-fiscal, serta tuntutan program prioritas yang besar tetap menjadi pekerjaan rumah yang serius. ([DJPPR](#))

Pada akhirnya, APBN yang sehat, kredibel, dan efektif adalah APBN yang tidak berhenti pada pertanyaan “berapa uang dibelanjakan”, tetapi melangkah pada pertanyaan yang lebih mendasar: “ke mana uang itu diarahkan, bagaimana ia dikelola, dan apa yang sungguh berubah karena anggaran itu.” Dalam negara demokratis dan berkembang seperti Indonesia, pertanyaan inilah yang menentukan apakah APBN akan dikenang hanya sebagai dokumen tahunan, atau sebagai instrumen kenegaraan yang sungguh-sungguh membangun masa depan. ([Anggaran](#))

Glosarium

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Defisit fiskal: Kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. ([Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan](#))

Ruang fiskal (fiscal space): Kapasitas pemerintah untuk membiayai prioritas atau merespons guncangan tanpa mengganggu kesinambungan fiskal dan stabilitas makroekonomi. ([IMF](#))

Kredibilitas fiskal: Tingkat kepercayaan terhadap kebijakan fiskal karena didukung aturan, asumsi yang realistis, pelaksanaan yang konsisten, dan tata kelola yang akuntabel. ([IMF](#))

Penganggaran berbasis kinerja: Pendekatan penganggaran yang mengaitkan program dan anggaran dengan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi hasil. ([Anggaran](#))

KPJM/MTEF: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau Medium Term Expenditure Framework, yaitu pendekatan penyusunan anggaran yang melihat konsekuensi fiskal lintas-tahun, bukan hanya satu tahun anggaran. ([DJPB Kemenkeu](#))

Unified budget: Pendekatan penganggaran terpadu yang menghilangkan fragmentasi lama antara belanja rutin dan belanja pembangunan. ([DJPB Kemenkeu](#))

Contingent liabilities: Kewajiban potensial yang dapat menjadi beban fiskal bila kondisi tertentu terjadi, misalnya karena jaminan atau penugasan lembaga tertentu. ([IMF](#))

Quasi-fiscal activities: Aktivitas yang secara substansi menyerupai kebijakan fiskal tetapi dilakukan melalui lembaga atau mekanisme di luar APBN langsung. ([IMF](#))

Value-driven spending: Pendekatan pengelolaan belanja pemerintah yang berorientasi pada nilai dan dampak nyata bagi masyarakat. ([DJPB Kemenkeu](#))

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu opini audit yang menyatakan laporan keuangan secara material disajikan wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. ([DJPB Kemenkeu](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pemeriksa Keuangan. (2025, 27 Mei). *BPK beri opini WTP atas LKPP tahun 2024 dan kawal belanja negara yang berdampak langsung pada rakyat.*

Direktorat Jenderal Anggaran. (2025). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Anggaran. (2025, 15 Agustus). *RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.*

Direktorat Jenderal Anggaran. (2026). *Postur APBN Indonesia.*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Siklus APBN.*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025, 27 Mei). *LKPP 2024 kembali raih opini WTP.*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2026). *APBN Kita Februari 2026.*

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2026). *Statistik utang pemerintah.*

International Monetary Fund. (2026, 21 Januari). *IMF Executive Board concludes 2025 Article IV consultation with Indonesia.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 19 September). *DPR sahkan UU APBN Tahun Anggaran 2025.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 23 September). *DPR setuju RUU APBN 2026 menjadi undang-undang.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 7 Januari). *Menkeu: APBN 2025 tunjukkan kinerja yang solid.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 11 Maret). *Siaran pers: Kinerja APBN awal 2026 tetap solid, menjadi penopang stabilitas dan akselerasi pertumbuhan.*

Media Keuangan Kementerian Keuangan. (2025, 2 September). *APBN 2026 untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.*

OECD. (2017). *Improving the allocation and efficiency of public spending in Indonesia.*

OECD. (2025). *Quality budget institutions.*

World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for better results.*

World Bank. (2024). *Funding Indonesia's Vision 2045.*

World Bank. (2024). *Indonesia's fuel subsidies reforms.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 7 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d4b1d7-91a0-839b-8cb9-b5d86c596a23>